

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Said Zainal. 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Yayasan Pancur.

Adminkiara. 2020. *Kiara Kecam Penangkapan Nelayan, Aktivis*

Lingkungan dan Mahasiswa di Makassar. Diakses pada 26 Agustus

2024, <https://www.kiara.or.id/2020/09/12/kiara-kecam-penangkapan->

[nelayan-aktivis-lingkungan-dan-mahasiswa-di-makassar/](https://www.kiara.or.id/2020/09/12/kiara-kecam-penangkapan-nelayan-aktivis-lingkungan-dan-mahasiswa-di-makassar/)

Agungnoe. 2023. *Pustral UGM Dukung Penyusunan Buku Putih Proyek*

Strategis Nasional (PSN). Diakses pada 26 Agustus 2024, dari

<https://ugm.ac.id/id/berita/pustral-ugm-dukung-penyusunan-buku->

[putih-proyek-strategis-nasional-psn/](https://ugm.ac.id/id/berita/pustral-ugm-dukung-penyusunan-buku-putih-proyek-strategis-nasional-psn/)

Amin, Muhammad Al. 2023. Laporan 4 Tahun Walhi Sulawesi Selatan 2018-2022.

Aprianti, Faridah dkk. 2023. Pelabuhan Makassar: Analisis Kebijakan

New Port Dalam Mendorong Pembangunan Daerah. *JANE (Jurnal*

Administrasi Negara).

Basri, Hasan. 2020. Pengelolaan, Pengawasan Kawasan Pesisir dan

Laut di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*. Vol. VIII, No. 2.

Chandra, Wahyu. 2020. Rugikan Nelayan, Walhi Sulsel Tuntut

Penghentian Tambang Pasir Laut dan Pembangunan Makassar

New Port. Diakses pada 26 Agustus 2024, dari

<https://www.mongabay.co.id/2020/07/04/rugikan-nelayan-walhi->

[sulsel-tuntut-penghentian-tambang-pasir-dan-pembangunan-makassar-new-port/](#)

Cominac, Diyosi, Surya Wiranti, dan Budiman Djoko Said. 2020.

Sinergisme Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Jawa Timur Dengan Wilayah Pertahanan Dalam Rangka Mendukung Kepentingan Nasional. *Jurnal Program Studi*. Vol. 6, No. 2.

Djakapermana, Ruchyat Deni. *Reklamasi Pantai Sebagai Alternatif Pengembangan Kawasan*. Kementrian PU: Sekretaris Direktorat Jendral Penataan Ruang.

Djamil, Muhammad Haykal Abdul Ghanie., Gumilang, Muhammad Rizki., Hantono, Dedi. 2022. Dampak Reklamasi terhadap Lingkungan dan Perekonomian Warga Pesisir di Jakarta Utara. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*. Vol. 18, No. 3

Dye, Thomas R. 2004. *Understanding Public Policy*. New York Oxford University Press.

Erlangga, Radhitya, 2022. *Dampak Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Terhadap Masyarakat Nelayan Pulau Kodingareng Kota Makassar*. Tesis. Universitas Hasanuddin.

Haris, Muhammad Rayhan, Mujar Ibnu Syarif, dan Nurlaili Rahmawati.

2023. Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2019 Terhadap Lingkungan Penambangan Pasir Laut Di Daerah Perairan Galesong Perspektif Siyasa Dustruriyah. *E-Journal Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*. Vol. 1, No. 1

Hosio, JE. 2007. *Kebijakan Publik dan Desentralisasi*. Yogyakarta: Laksbang.

Ilyasa, Feryl, Muhammad Zid, Mieke Miarsyah. 2020. Pengaruh Eksploitasi Sumber Daya Alam Perairan Terhadap Kemiskinan Pada Masyarakat Nelayan. *Jurnal Pendidikan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan*. Vol. 21, No. 1.

Islamy, Irfan. 2003. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bina Aksara.

Japar, Juliati M. 2019. Perolehan Hak Atas Tanah Hasil Reklamasi Pantai Yang Dilakukan Oleh Perseroan Terbatas (PT). *Clavia: Journal Of Law*. Vol.17, No.1.

Kontan.co.id. *KPP target seluruh provinsi punya perda zonasi pesisir*. Diakses dari <https://nasional.kontan.co.id/news/kkp-target-seluruh-provinsi-punya-perda-zonasi-pesisir> pada 5 Februari 2024, pukul 10.00 WITA.

- Maharani, Tsanayya Violeta. 2022. Peraturan Daerah RZWP3K Di Antara Aksesptabilitas Dan Resistensi (Studi Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Zonasi RZWP3K Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*. Vol.4, No.1
- Mubarok, Djihadul. 2021. Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Terhadap Minat Bersekolah Di Yayasan Tunas Mulai Bantargerbang Kota Bekasi. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol.2, No. 2.
- Mustari, Nuryanti. 2015. *Pemahaman Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Leutika Prio.
- Nursidah dkk. 2012. Pengembangan Institusi Untuk Membangun Aksi Kolektif Lokal dalam Pengelolaan Hutan Kawasan Lindung SWP Das Arau, Sumatra Barat. *JMHT* Vol. XVIII: 18-30, April 2012.
- Peduli Rakyat. 2020. *Pandemic COVID-19: Reklamasi Proyek MNP Terus Beraktivitas, Nelayan Tradisional Dan Perempuan Pesisir Menuntut Tanggung Jawab Negara*. Peduli Rakyat. Diakses Pada 24 November 2024, dari <https://www.pedulirakyat.co.id/%E2%80%8Bpandemic-covid-19-reklamasi-proyek-mnp-terus-beraktivitas-nelayan-tradisional-dan-perempuan-pesisir-menuntut-tanggungjawab-negara/5456/>
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.*

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 23/Permen-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Putra, Eric Elmahyudi, Dedi Epriadi. 2021. Dampak Reklamasi Di Kawasan Pesisir Pulau Batam Terhadap Keberlangsungan Hidup Nelayan Sekitar. *Ejournal UPBATAM*.

Rayyansah dkk. 2022. *Kebijakan Publik*. P.T. Global Eksekutif Teknologi.

Sakro, Agustinus. 2020. *Sumber Daya Bersama, Kontestasi Hadirnya Spirit Berdesa: Studi Kasus Pengelolaan Telaga Jonge Desa Pacarejo, Kabupaten Gunung Kidul*. Governabilitas. Volume 1 Nomor 2 Desember 2020.

Satria, Arif. 2012. *Elinor Ostrom dan Perikanan*. Diakses pada 11 September 2024, dari <https://lautanopini.wordpress.com/2012/06/15/elinor-ostrom-dan-perikanan/>

Soemarwoto, Otto. 2009. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Madha University.

Sumardjono, Maria S.W dkk. 2011. *Pengaturan Sumber Daya Alam Di Indonesia, Antara Yang Tersurat Dan Tersirat*. Kajian Kritis Undang-Undang Terkait Penataan Ruang dan Sumber Daya Alam. Yogyakarta: Gadjah Madha University Press.

Taufiq, Muhammad dkk. 2014. *Kajian Model Reformasi Birokrasi*.

Jakarta: Pusat Kajian Reformasi Administrasi.

Teja, Mohamad. 2015. Pembangunan Untuk Kesejahteraan Masyarakat

Di Kawasan Pesisir. *Jurnal DPR RI*. Vol.6, No.1.

Terkini.id. 2020. ASP Bagi-Bagi Selebaran Tuntutan Hentikan Tambang

Pasir Laut dan Reklamasi MNP!. Makassar Terkini. Diakses Pada 24

November 2024, dari [https://makassar.terkini.id/asp-datangi-kantor-](https://makassar.terkini.id/asp-datangi-kantor-gubernur-bagi-bagi-selebaran-tuntut-hentikan-tambang-pasir-laut-dan-reklamasi-mnp/)

[gubernur-bagi-bagi-selebaran-tuntut-hentikan-tambang-pasir-laut-](https://makassar.terkini.id/asp-datangi-kantor-gubernur-bagi-bagi-selebaran-tuntut-hentikan-tambang-pasir-laut-dan-reklamasi-mnp/)

[dan-reklamasi-mnp/](https://makassar.terkini.id/asp-datangi-kantor-gubernur-bagi-bagi-selebaran-tuntut-hentikan-tambang-pasir-laut-dan-reklamasi-mnp/)

Wardhana, Isal. 2020. Pengelolaan Wilayah Dan Sumber Daya Pesisir

Terintegrasi Dalam Implementasi Rencana Tata Ruang Kawasan

Industri Oleochemical Maloy Kutai Timur; (Sebuah Telaah Kritis).

Jurnal Renaissance. Vol. 5, No. 1.

FYurista, Ananda Prima dan Dian Agung Wicaksono. 2017. Kompabilitas

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K)

sebagai Rencana Tata Ruang yang Integratif. *Jurnal Hukum*. Vol. 6,

No.9.

LAMPIRAN

Surat Keterangan Izin Penelitian PTSP Prov. Sulawesi Selatan



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Bougainville No 5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231

Nomor	: 24487/S.01/PTSP/2024	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Walikota Makassar
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan FISIP UNHAS Makassar Nomor : 01688/UN4.8/PT.01.04/2024 tanggal 20 September 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: NAHDLAH DZAKKIRAH
Nomor Pokok	: E041201052
Program Studi	: Ilmu Politik
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. P. Kemerdekaan Km., 10 Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" DAMPAK KEBIJAKAN RZWP3K (RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL) DI KELURAHAN KALUKU BODOA KECAMATAN TALLO "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **20 September s/d 08 November 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
 Pada Tanggal 20 September 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
 Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
 Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth
 1. Dekan FISIP UNHAS Makassar di Makassar;
 2. *Pertinggal.*

Surat Keterangan Izin Penelitian Kecamatan Tallo



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
KECAMATAN TALLO

Jalan A.R. Hakim No.54, Ujung Pandang Baru, Makassar, Sulawesi Selatan Kode Pos 90211
Telepon (0411) 448415
Laman tallo.makassar.go.id, Pos-el tallokec.makassarkota.go.id

Makassar, 02 Oktober 2024

Nomor : 070/ 414 /09/X/2024
Lamp : -
Hal : Rekomendasi Penelitian

Kepada
Yth. Lurah Kaluku Bodoa
di -
Makassar

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, Nomor : 070/3506/SKP/SB/DPMPTSP/ 9/2024, Tanggal 30 September 2024, Perihal : tersebut diatas, maka bersama ini disampaikan kepada saudara bahwa :

Nama : NAHDLAH DZAKKIRAH
NIM/Jurusan : E041201052 / Ilmu Politik
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) / Universitas Hasanuddin Makassar
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan Km.10, Makassar
Judul : **"DAMPAK KEBIJAKAN RZWP3K (RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU – PULAU KECIL) DI KELURAHAN KALUKU BODOA KECAMATAN TALLO"**

Bermaksud mengadakan **Penelitian**, di Wilayah Kecamatan Tallo Kota Makassar dalam rangka **Skripsi**, yang akan dilaksanakan mulai tanggal **20 September s/d 08 November 2024**.

Sehubungan dengan hal tersebut pada prinsipnya kami dapat **menyetujui** dengan memberikan surat rekomendasi izin penelitian ini dan memberikan bantuan dan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan kepada Saudara untuk dimaklumi dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan kembali dan melampirkan satu rangkap hasil penelitian kepada Camat Tallo Kota Makassar.

a.n. CAMAT TALLO,
SEKRETARIS

RAHMAT, S.STP., M.Si
Pangkat : Pembina
Nip : 19781231 199711 1 001

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prop. Sul-Sel di Makassar;
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prop. Sul Sel di Makassar;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Peringgal.

Surat Keterangan Izin Penelitian Kelurahan Kaluku Bodoa



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
KECAMATAN TALLO
KELURAHAN KALUKU BODOA

Jl. Kelurahan No. 42 Email : kkalukubodoa@gmail.com Makassar Kode Pos 90211



Makassar, 3 Oktober 2024

Nomor : 000/136/LKB/X/2024
Lampiran : -
Perihal : Izin Survey

Yth. PJ Ketua RT/RW Kel. Kaluku Bodoa
di
Makassar

Dengan Hormat

Menindaklanjuti Surat Kecamatan Tallo Nomor 070/614/09/X/2024 tanggal 02 Oktober 2024 maka bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu yang tersebut di atas kiranya dapat membantu sesuai nama di bawah ini :

Nama : NAHDLAH DZAKKIRAH
NIM / Jurusan : E041201052/ILMU POLITIK
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) Universitas Hasanuddin Makassar
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar
Judul : DAMPAK KEBIJAKAN RZWP3K (RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL) DI KELURAHAN KALUKU BODOA KECAMATAN TALLO

Bermaksud mengadakan Penelitian pada wilayah kerja Bapak/Ibu, dalam rangka Untuk Melakukan Pengumpulan Data Lapangan Mengenai Dampak Kebijakan RZWP3K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil) di Wilayah Kel. Kaluku Bodoa Kec. Tallo Kota Makassar yang akan dilaksanakan mulai tanggal 20 September 2024 sampai dengan 08 November 2024.

Demikian disampaikan dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasil penelitian Kepada Walikota Makassar Cq. Kepala Kantor Badan Kesatuan Bangsa Kota Makassar.



a.n Lurah
Sekretaris

ANWAR BACHTIAR

Pangkat, Gol : Penata Muda Tingkat I
NIP : 19750516 200312 1 007

..PRINTED BY SIKURAH..

**Wawancara dengan Bapak Amiruddin Massiga selaku Ketua
Nelayan di Kelurahan Kaluku Bodoa**



**Wawancara dengan Slamet Riadi Selaku Koordinator Dept. Riset
dan Publik Engagement Walhi Sulsel**



**Wawancara dengan Achmad Fakar Selaku Pegiat di Aliansi
Selamatkan Pesisir (ASP)**

